

BAB III

PEMBAHASAN

A. Catatan Pembuka

Berita mengenai seratus hari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dianggap penting dan menarik perhatian publik. Hal ini dikarenakan masyarakat ingin menilai sejauh mana langkah-langkah yang diambil pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janji politiknya. Ada faktor lain mengapa berita seratus hari pemerintahan Jokowi-JK menarik perhatian publik karena suasana kampanye pemilu 2014 yang panas, hal ini dipengaruhi juga karena hanya ada dua kandidat yang beradu dalam pemilu 2014. Dua kandidat ini memiliki masa yang banyak dan koalisi yang kuat. Selama perjalanan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK tidak luput dari perhatian pemberitaan media massa. Masing-masing media memberitakan masa seratus hari tersebut dengan berbagai versi, adapun media yang melihat dari sisi negatif dan ada juga yang memberitakan dengan sisi yang lebih positif. Setiap media memiliki pandangan berbeda mengenai momen seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya adalah koran Sindo. Koran Sindo memiliki konstruksi sendiri mengenai berita seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, sehingga peneliti memilih judul “Wacana Pemberitaan Seratus Hari Pemerintahan Jokowi-JK di Koran Sindo” dengan menggunakan analisis wacana model Teun Van Dijk.

Analisis Model Teun Van Dijk digolongkan dalam tiga tahapan elemen yakni teks, konteks sosial dan kognisi sosial. Ketiga tahapan ini yang akan menjadi acuan untuk menganalisis berita seratus hari pemerintahan Jokowi-JK di koran Sindo. Untuk mempermudah analisis teks berita ini peneliti membagi berita dalam dua tema besar, yang mana diambil setelah peneliti melakukan riset judul berita di koran Sindo yang berhubungan dengan Wacana Seratus Hari Pemerintahan Jokowi-JK, dimulai pada tanggal 30 Januari sampai tanggal 7 Februari 2015, total berita ada 9 naskah berita yang mana menyangkut mengenai judul tersebut. Dari riset judul berita, peneliti mendapat dua tema besar yakni:

1. Kinerja Kabinet pemerintahan Jokowi-JK
2. Citra Jokowi

Pengelompokan berita dalam dua tema besar dilakukan agar wacana yang dibuat oleh koran Sindo terhadap pemberitaan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK terlihat secara utuh sehingga peneliti mendapatkan keseluruhan makna umum dari suatu teks (**Struktur Makro**) yang mungkin telah dikonstruksikan oleh koran Sindo. Seperti pendapat Tuchman pada dasarnya isi media adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat mempresentasikan realitas. Akibatnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikan (Sobur, 2004:88).

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan wacana yang dibuat koran Sindo dalam memberitakan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK. Van Dijk mengatakan *“Disource analysis an interdisciplinary discipline. It is also interested in the analysis of the various contexts of discourse, that is, in the cognitive processes of production and reception and in the sociocultural dimensions of language use and communication”* (Van Dijk, news and discourse, www.Discourses.org diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 11.18).

Dalam media surat kabar teks dibentuk berdasarkan pada kontruksi yang dibuat oleh media yang akan dikaitkan dengan kognisi sosial dan konteks sosial yang mempengaruhi para pembuat teks tersebut melakukan produksi teks.

B. Analisis Data

1. Analisis Teks

a. Kinerja Kabinet Jokowi-JK

Salah satu bahasan dalam pemberitaan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK adalah mengenai Kinerja Kabinet, yang mana kinerja kabinet dilihat sebagai upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janji politik pada saat pemilu. Kekalahan Pemilu yang dialami koalisi Merah Putih yang mana partai Perindo masuk dalam koalisi tersebut, sepertinya mempengaruhi bagaimana koran Sindo mewacanakan berita mengenai kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini dapat dilihat dalam teks berita dengan judul *Menagih Janji-Janji Masa Kampanye,*

diketahui bahwasanya kampanye 2014 sangat panas, kedua kandidat mempunyai program-program yang unggul yang mana untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat memilih salah satu kandidat tersebut.

Hasil pemilu 2014 diketahui bahwa Koalisi Indonesia Hebat yang memenangkan pemilu, hal ini menjadikan bukti bahwa program Jokowi dan JK disenangi masyarakat. Tetapi dalam naskah berikut koran Sindo ingin menunjukkan bagaimana janji-janji yang berupa program tersebut, walaupun ada beberapa program yang berhasil diwujudkan tetapi masih banyak janji yang tidak terealisasikan, bahkan koran Sindo menulis bahwa bukan hanya sekedar janji-janji yang dicanangkan Jokowi-JK yang tidak terealisasikan, tetapi timbul masalah-masalah baru yang muncul, berikut naskah teks berita tersebut:

Harapan besar diletakkan di pundak presiden Jokowi. Baru tiga bulan lebih kerja pemerintahannya, Jokowi belum mampu memenuhi janji-janji kampanyenya dan harapan rakyat Indonesia. **Alih-alih membawa Indonesia Kemajuan,** mantan wali kota Solo itu justru tersandra oleh konflik internal dan berbagai kepentingan partai politik dan partai koalisi yang mengusungnya.

Wajar jika banyak yang menilai Kabinet Kerja Jokowi masih jalan di tempat karena belum ada kemajuan signifikan . Bahkan tidak sedikit yang pesimistis dan meramalkan masa depan kepemimpinan Jokowi tidak akan berlangsung lama.

“Ada yang berhasil tapi masih ada yang belum berhasil!”. Harapannya terlalu besar, Pak Jokowi dianggap bisa mengubah segalanya. Berangkat dari kepribadian beliau yang jujur dan bersih berakhlak, ternyata belum tentu bisa (mengubah). Yang berhasil saya senang gebrakan Menteri Susi, saya setuju itu. Yang tidak berhasilnya ya ini (KPK dan Polri) berkepanjangan belum cepat selesai, “ungkap ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.

Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, seratus hari pemerintahan Jokowi memang ada kebijakan yang bagus dan perlu diapresiasi dan ada juga yang masih kurang dan perlu diperbaiki."yang cukup dipuji dan apresiasi adalah langkah terhadap kasus narkoba, eksekusi gembong narkoba. Langkah yang patut diapresiasi dan langkah untuk proteksi kedaulatan laut. Namun, beberapa kebijakan ekonomi terkait kenaikan harga BBM, elpiji, listrik, dan lain-lain yang menyulitkan dan memberatkan kehidupan rakyat perlu dikoreksi. Termasuk dalam perpanjangan MOU Freeport yang berpotensi menyalahi UU Minerba (Sindo, 2015:11).

Pemberitaan di atas koran Sindo menggunakan level **retoris** yakni **hiperbola** (pemakaian kata yang dilebih-lebihkan) dalam kalimat "Harapan besar diletakkan **di pundak** presiden Jokowi". Kemudian dapat dilihat dalam unsur **tematik** dalam naskah di atas, bagaimana koran Sindo memproduksi wacana mengenai seratus hari pemerintahan Jokowi-JK dengan tidak ada prestasi yang dibebankan. Di awal berita koran Sindo menyuguhkan bagaimana ironisnya setelah 3 bulan menjabat tetapi tidak ada janji yang dapat ditepati. Koran Sindo mengatakan bahwa waktu 3 bulan adalah penentu kebijakan, dalam pemakaian nama Jokowi koran Sindo tidak menyebutkan nama JK, hal ini memperlihatkan bagaimana koran Sindo menafsirkan bahwa Jokowi yang bertanggung jawab atas setiap permasalahan, padahal dalam pemerintahannya Jokowi dibarengi dengan JK, namun disisi lain tidak adanya nama JK dalam teks berita membuat tanda tanya besar, koran Sindo sengaja menyembunyikan kenyataan bahwa JK juga terlibat dalam pemerintahan tersebut.

Hal ini seperti disebut dalam strategi **semantik** yakni elemen wacana **detail** yang mana pihak koran Sindo akan menampilkan informasi yang berlebihan jika

hal itu menguntungkan pihaknya dan akan menampilkan informasi yang sedikit (bahkan jika perlu tidak disampaikan) kalau hal itu tidak menguntungkan pihaknya. Apakah karena keterlibatan sang pemilik media dalam koalisi yang sama dengan JK yang mana diketahui sebagai wakil dari Golkar yang masih satu koalisi dengan pemilik media tersebut, sehingga nama JK tidak dicantumkan.

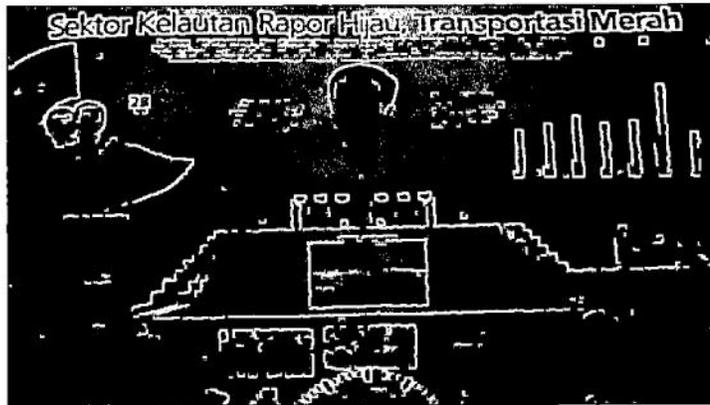
Paragraf kedua koran Sindo menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan berlangsung lama, dalam hal ini koran Sindo ingin menekankan makna (**semantik**) yakni dengan elemen **maksud** bahwa problematika yang dibawa Jokowi-JK sangat parah sehingga tidak dapat dibenahi lagi, satu-satunya cara yakni dengan diberhentikan. Oleh karena itu strategi kuasa bekerja melalui normalisasi dan regulasi, menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan disiplinkan lewat wacana. Jadi khalayak ditundukkan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi dengan wacana dan mekanisme, berupa prosedur, tata cara, dan sebagainya (Eriyanto, 2011:71). Di sini koran Sindo mewacanakan agar masyarakat tidak segan-segan memberhentikan Jokowi.

Koran Sindo ingin menilai bagaimana kerja masing-masing sektor dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK yang mana terhimpun dalam naskah berita dengan judul *Sektor Kelautan Rapor Hijau, Transportasi Merah*, berikut *lead* pada naskah teks tersebut:

Tiga bulan sudah pemerintahan Jokowi-JK berjalan. Begitu banyak harapan rakyat digantungkan pada dua pemimpin bangsa ini. Terkikisnya kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, mudahnya akses pendidikan, harga bahan-bahan pokok yang terjangkau, hingga birokrasi bersih, ringkas dan anti suap. Bisakah semua itu terwujud? Tak dipungkiri, 100 hari pertama masih banyak lubang disana-sini. Kinerja di sektor kelautan/kemaritiman dinilai publik sangat memuaskan, sementara transportasi sangat mengecewakan, saatnya bekerja lebih baik (Sindo, 2015:13).

Gambar 3.1

Sektor Kelautan Rapor Hijau, Transportasi Merah



Sumber: (koran Sindo 2015)

Melalui lead tersebut, dapat dilihat bagaimana koran Sindo ingin memaparkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sudah mencapai tiga bulan, penggunaan leksikon “sudah” dalam naskah berita tersebut menyimpulkan bahwa tiga bulan adalah waktu yang lama untuk bisa merealisasikan janji-janji kampanye, kemudian koran Sindo mencoba untuk mengingatkan bahwa salah satu alasan Jokowi terpilih menjadi Presiden RI adalah keberhasilannya memimpin kota Solo dan Jakarta sehingga rakyat menggantungkan harapan yang besar kepada Jokowi agar bisa

membawa perubahan yang banyak, disini koran Sindo menggunakan elemen **ilustrasi** yakni dengan menampilkan contoh seperti menuntaskan kemiskinan, membuka banyak lapangan kerja, mempermudah aspek pendidikan dan terjangkau harga bahan pokok, birokrasi bersih dan anti suap merupakan masalah yang paling krusial yang mana harus dituntaskan pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi pada kenyataannya harapan-harapan yang dituliskan koran Sindo merupakan kebalikan kejadian yang sedang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK, yakni naiknya harga BBM sehingga membuat harga kebutuhan pokok mahal, dan membuat rakyat bertambah miskin karena semua harga naik, kemudian munculnya kasus Komjen (Komisaris Jenderal) Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri yang diusulkan oleh presiden, padahal rakyat meminta pemerintahan yang bersih tetapi presiden malah menunjuk Budi yang tersandung masalah dengan KPK, untuk masuk kedalam pejabat publik. Koran Sindo sengaja memakai elemen **penalaran** dalam teks berita tersebut.

Gambar 3.2

Bagan Kepuasan Kinerja Kabinet



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Gambar 3.3

Prosentase Kebijakan Pemerintah



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Menambah keyakinan para khalayak pembaca, koran Sindo menyuguhkan elemen **ekspresi** yakni dalam bentuk **grafis** berupa polling dan **tabel** yang telah dilakukan koran Sindo dengan bekerja sama dengan Litbang dalam memperoleh data tersebut. Penggunaan warna merah dalam judul berita “ Sektor Kelautan Rapor Hijau, Transportasi Rapor Merah” mengindikasikan bahwa ada hal yang ingin ditonjolkan dalam berita tersebut yaitu penulisan transportasi rapor merah dengan ditulis dengan warna merah yang mana berarti ‘jelek’ sehingga menimbulkan makna bahwa koran Sindo ingin menyampaikan Sektor kerja kabinet yang jelek.

Koran Sindo mengambil judul *Evaluasi Terhadap Kinerja Kabinet* dalam mewacanakan kinerja kabinet, hal ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pemerintah melakukan upaya untuk merealisasikan program yang telah dibuat. seperti yang tertera dalam naskah berita berikut:

Publik menilai apa yang sudah **dikerjakan pemerintah saat ini masih pada level biasa. Belum ada gebrakan** yang ditunjukkan kabinet besutan Jokowi yang bisa dirasakan masyarakat.

Saat ini publik menghadapi kenyataan rapor **kinerja Kabinet Kerja secara umum masih belum maksimal**. Publik akan menunggu. Publik akan menguji integritas dan kerja nyata pemerintahan. Evaluasi bukan hanya dalam masa 100 hari, yang lebih penting adalah 1.815 hari kedepan. **Apakah pemerintahan Jokowi-JK mampu mengelola harapan publik dan kepentingan rakyat atau masuk dalam negosiasi dan kompromi politik antarelite.**

Paragraf diatas dapat dilihat bagaimana koran Sindo menunjukkan bahwa publik menilai kinerja yang dilakukan Kabinet Kerja belum maksimal sehingga

masih banyak yang perlu diperbaiki, tidak terkecuali pada semua sektor. Padahal dalam naskah berita di atas, koran Sindo menjabarkan *polling* menjawab cukup puas dengan kinerja yang dilakukan Kabinet Kerja tersebut. Dalam memproduksi kata koran Sindo menggunakan kata 'biasa' (pada kalimat yang dipertebal) pada paragraf pertama, kata 'biasa' menunjukkan bahwa kinerja Kabinet Jokowi-JK selama tiga bulan ini belum menghasilkan apa-apa. Padahal dalam grafik di atas menunjukkan 46% masyarakat puas, 28% puas dan 2,6% sangat puas, jika dijumlahkan akan berjumlah 30,6% menjawab bagus dibanding dengan responden yang mengatakan kurang puas 20,4% dan tidak puas 2,4%. Dalam kalimat terakhir paragraf kedua koran Sindo memberikan sebuah pertanyaan yang mana dalam kalimat tersebut mengandung makna **eksplisit** bahwa rakyat memberi harapan yang besar terhadap kepemimpinan Jokowi-JK sehingga Jokowi-JK harus bekerja keras, bukannya terlibat dalam negosiasi dan kompromi antarelite. Dalam penggunaan kata (**Stilistik**) dalam kalimat tersebut koran Sindo bermaksud untuk menyindir kepada pemerintahan tersebut.

Publik tentu menunggu **kinerja Kabinet Kerja yang professional, berprestasi, berintegrasi, dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus besar**. Masyarakat tentu akan memonitor arah kebijakan sejumlah kementerian. Waktu yang tersisa selama lima tahun kedepan akan memberikan jawaban dari harapan publik berupa kebijakan strategis dan hasil kerja nyata untuk mewujudkan kesejahteraan di segala bidang (Sindo edisi 3477, hal:13).

Paragraf di atas menunjukkan bahwa sampai sekarang kinerja Kabinet Kerja belum profesional, sehingga harus menunggu sampai Kabinet Kerja bisa menjadi

professional. Dari teks tersebut koran Sindo menggunakan leksikon 'menunggu' yang dapat diartikan dari kata tersebut bahwa masyarakat menantikan Kabinet Kerja bekerja secara profesional walaupun tidak tahu sampai kapan. Selain kinerja Kabinet Kerja belum profesional koran Sindo memproduksi makna bahwa Kabinet Kerja juga belum berprestasi, berintegrasi, dan belum mampu menyelesaikan permasalahan dan kasus besar.

Dilihat dari berita berikutnya koran Sindo mewacanakan mengenai pergantian menteri, koran Sindo menilai bahwa banyaknya program yang tidak terealisasi karena kurang kompetenya menteri yang bertugas. Dalam teks "Menteri gagal perlu di-*reshuffle*" dengan judul *lead* "Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kritik gaya blusukan menteri Jokowi" dan diungkapkan dari *lead* dalam berita teks sebagai berikut:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak segan mengganti menteri-menterinya yang gagal menjalankan tugas pemerintahan.

Politikus PDIP Pramono Anung mengkritik gaya blusukan para menteri. . (Sindo edisi 3473, hal:2).

Melalui teks tersebut, dapat dilihat bagaimana koran Sindo mencoba memproduksi makna mengenai kegagalan menteri Jokowi, padahal Pemerintahan Kabinet Kerja baru berjalan seratus hari tetapi koran Sindo membuat **topik** bahwa Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK buruk tidak dapat dibenahi sehingga perlu di-*reshuffle* (diganti). Buruknya kinerja menteri dapat disimpulkan karena beberapa faktor misalnya karena tim penghimpun menteri pasangan Jokowi-JK

salah dalam pemilihan menteri atau juga karena kurang bagusya koordinasi diantara jajaran pemerintahan. Dalam naskah tersebut koran Sindo menggunakan unsur **skematis** yakni **subkategori komentar** yang mana koran Sindo sengaja menyuguhkan komentar dari pihak PDIP yang mengkritik kinerja menteri Jokowi-JK di awal berita untuk memberikan kesan kepada pembaca bahwa ada konflik internal yang terjadi dan menulis komentar dari perwakilan Nasdem yang mana mengatakan masih optimis dengan pemerintahan Jokowi-JK di akhir naskah berita.

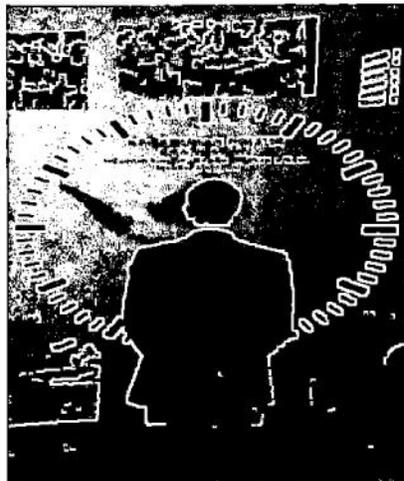
Dilihat dari *lead* tersebut dapat diketahui bagaiman koran Sindo meemaparkan bahwa partai yang mendukung Jokowi yakni PDIP juga mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut. Di sini koran Sindo menilai menggunakan unsur **semantik** (makna yang ingin ditekankan dalam teks berita) bahwa tidak hanya tidak harmonis dengan partai oposisi, Jokowi juga tidak harmonis dengan partai pendukung sampai-sampai partai pendukungnya mengkritik menteri-menteri yang masuk dalam tananggung jawab Jokowi. Koran Sindo memilih **leksikon** 'diminta' memberikan kesan bahwa Jokowi tidak pernah mendengar usulan pihak lain, sehingga harus dipaksa dengan cara diminta.

Selain berita di atas koran Sindo mencoba mewacanakan mengenai *Kegaduhan Politik Era Jokowi* menjadi pilihan judul berita selanjutnya yang diangkat koran Sindo dalam tema kinerja Kabinet Kerja. Dalam memproduksi wacana naskah berita tersebut, koran Sindo menggunakan elemen **grafis** untuk menjabarkan kebijakan apa saja yang menuai kontroversi. Penggunaan elemen

grafis dalam naskah berita ini untuk mempertahankan wacana tersebut, seperti pada foto di bawah ini gambar Jokowi yang diambil dari belakang yang mana hanya terlihat bagian belakang Jokowi dengan kedua tangan sedang memegang sebuah buku bertuliskan program kerja 100 hari, dan di depan foto tersebut terlihat peta negara Indonesia dengan dikelilingi oleh lingkaran seperti jam, dengan gambar tersebut koran Sindo ingin mewacanakan bahwa Jokowi seorang yang tidak mau mendengar kritikan dari pihak lain, sehingga buku program kerja 100 hari disembunyikan dibelakan, gambar jam dan peta Indonesia dalam naskah tersebut dimaksudkan bahwa waktu terus berjalan dan masih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki Indonesia.

Gambar 3.4

Kontroversi Kebijakan Jokowi-JK



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Elemen grafis juga ditunjukkan untuk memberi gambaran kepada pembaca apa saja kebijakan yang menjadi kontroversi, penggunaan elemen grafik pada naskah berita berikut untuk menyakinkan khalayak pembaca Sindo terhadap kebijakan yang kontroversi.

Berita terakhir mengenai tema kebijakan Kabinet Kerja yakni berita tentang *Infrastruktur Jangan hanya di atas Kertas*. Koran Sindo menyajikan bagaimana pemerintahan Jokowi-JK membuat anggaran yang sangat besar untuk infrastruktur tetapi pada kenyataannya belum banyak yang terealisasikan. Berikut naskah teks tersebut:

Dalam program nawacita pemerintahan Jokowi-JK menempatkan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor sebagai prioritas. **Komitmen itu ditunjukkan dengan menggenjot anggaran untuk infrastruktur.**

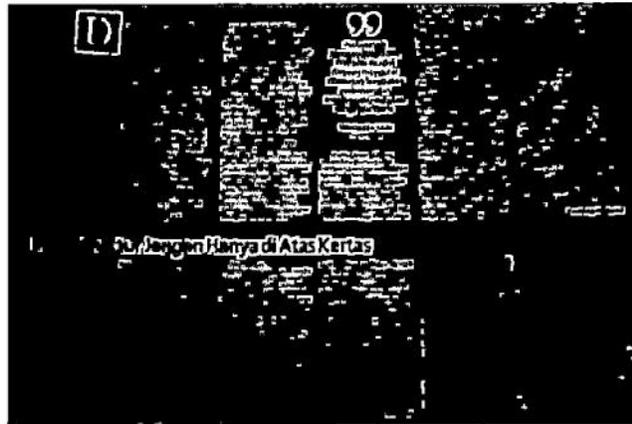
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp5.519,4 triliun.

Sampai dengan 100 hari pemerintahan ini, persiapan kearah itu memang telah dilakukan. **Sejumlah kebijakan terkait diambil, antara lain menggabungkan sejumlah kementerian yang terkait infrastruktur** seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, menambah Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dulunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga mengalihkan dana subsidi untuk infrastruktur.

Meski demikian semangat membangun infrastruktur itu masih harus diwujudkan lebih realistis. Sejauh ini, belum banyak yang bisa direalisasikan. Disektor energi misalnya, semua masih sebatas aturan atau pembentukan tim pendukung. Contoh target pemerintahan menaikkan cadangan BBM hingga 30 hari masih jauh panggang dari api jika pembangunan kilang BBM tidak juga direalisasikan . Boleh dikata, untuk infrastruktur selama 100 hari pemerintahan Joko Widodo, baru sempurna diatas kertas. Realisasinya, sangat ditunggu demi terwujudnya Negara yang kuat dan berdaulat (Sindo edisi 3477, hal:14).

Gambar 3.5

Infrastruktur Jangan Hanya di Atas Kertas



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Dari paragraf diatas koran Sindo ingin menunjukkan bahwa Kabinet Jokowi-JK memang sangat rinci dalam merencanakan suatu program, terbukti dengan penggabungan sejumlah kementerian, tetapi perencanaan yang rinci tidak menjamin bahwa program akan dapat terwujud. Di sini koran Sindo menyatakan bahwa selama 100 hari ini program kerja Jokowi-JK hanya sebatas di atas kertas, yang mana diindikasikan bahwa belum ada langkah yang nyata dalam 3 bulan pemerintahan tersebut.

Dari berita-berita yang diproduksi koran Sindo mengenai kinerja Kabinet Jokowi-JK, koran Sindo mewacanakan bahwa kinerja Kabinet masih buruk. Terlihat dari bagaimana koran Sindo membuat naskah berita tersebut, ada beberapa hal yang tekankan oleh koran Sindo dalam pembahasan Kinerja Kabinet,

seperti mengenai adanya konflik internal dalam pemerintahan yang menyebabkan terganjalnya program, tidak profesionalnya menteri dalam jajaran Kabinet Kerja sehingga perlu di-*ressuffle* sampai dengan program-program yang hanya sebatas di atas kertas dan tidak terealisasikan. wacana terhadap kinerja kabinet kerja yang dilakukan koran Sindo tentunya mempunyai hubungan kuat terhadap pemilik media yakni Hari Tanoe Soedibjo (HT), di mana HT sebagai pemilik media dapat mengatur isi dan alur medianya.

Kita mengetahui bahwa HT merupakan ketua dari Perindo yang mana masuk dalam jajaran Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan lawan dari Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Jokowi-JK. Dalam koran Sindo diwacanakan bahwa salah satu terganjalnya program kabinet adalah karena adanya konflik internal, hal ini terjadi karena HT selaku pihak oposisi ingin mengungkapkan kelemahan Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan pemenang dari Pemilu 2014, bahwa dalam KIH banyak terjadi perselisihan padahal untuk membangun pemerintahan yang bagus dibutuhkan koalisi yang kuat.

Wacana mengenai kegagalan para menteri yang perlu di-*resuffle* yang mana dalam Kabinet Kerja hampir semuanya adalah Koalisi Indonesia Hebat, HT ingin mewacanakan bahwa menteri-menteri dari KIH tidak kompeten, Jokowi-JK hanya memilih menteri berdasarkan siapa yang mendukung Jokowi-JK bukan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya.

b. Citra Jokowi

Jokowi dikenal publik sebagai seorang yang *media darling* yakni sosok yang disukai media, menurut Retno Wulandari *media darling* Jokowi terjadi bukan karena dia membeli media tetapi karena sikap Jokowi yang melayani media seperti aksesibilitas yang begitu mudah untuk para pekerja media, ramah dengan pekerja media, autensitas meski sering disebut pencitraan tetapi dia melakukan apa yang dilakukan pemimpin (Wulandari, 2014:35).

Berbeda dengan yang dikemukakan Retno Wulandari bahwa Jokowi seorang *media darling*, Koran Sindo mewacanakan citra yang negatif mengenai Jokowi. Seperti pada berita berikut: *Presiden Tunggu Praperadilan*. Dalam *lead* berita tersebut koran Sindo mengatakan sebagai berikut:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebelum mengambil keputusan atas konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Gambar 3.6

Prabowo mengunjungi Jokowi di Istana Presiden



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Melalui *lead* tersebut, dapat dilihat bagaimana koran Sindo mencoba memproduksi makna mengenai citra presiden yang sekarang redup karena kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang mana merupakan calon Kapolri satu-satunya yang diajukan oleh pihak presiden dengan pertimbangan dari PDI-P. Tetapi pencalonan tersebut terganjal masalah dengan KPK, yang menemukan kejanggalan pada harta kekayaannya. Dalam hal ini presiden dinilai tidak tegas karena tidak dapat mengambil keputusan, sehingga harus menunggu peradilan sampai diketahui siapa yang bersalah antara KPK dan Polri.

Dilihat dari berita di atas koran Sindo ingin menunjukkan bahwa Jokowi tidak dapat mengambil keputusan sendiri padahal Jokowi merupakan Presiden yang mana keputusan Presiden merupakan produk hukum. Untuk mengambil keputusan

saja Jokowi tidak bisa keluar dari keputusan partai mendukungnya yakni PDI-P yang mana mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal banyak pihak yang sudah meminta presiden untuk segera mengambil keputusan sendiri. Dalam naskah berikutnya koran Sindo mengungkapkan bahwa Jokowi menemui Prabowo, berikut teks tersebut:

Pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan perjumpaan pertama mereka setelah pelantikan presiden , 20 Oktober 2014 lalu. Mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat, Prabowo yang mengendarai lexus B17GRD tiba diistana Bogor sekitar pukul 14.00 WIB.

Mantan Pangkostrad ini mengumbar senyum lebar kepada semua orang. Prabowo mengaku kedatangannya tak lain untuk bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik.

Selain itu Prabowo menyampaikan undangan kepada Jokowi untuk menghadiri acara penganugerahan gelar pendekar pencak silat utama Februari mendatang."Tradisi kita setiap presiden adalah pendekar utama pencak silat Indonesia, saat itu beliau mencrima (gelar) pendekar utama dan pakaian pencak silat Dunia ini.

Melalui teks di atas koran Sindo ingin menunjukkan bahwa karena Jokowi terkena masalah lantas Jokowi mau berhubungan dengan Prabowo yang mana pada waktu kampanye menjadi pesaingnya. Dalam teks yang diproduksi koran Sindo menyebutkan bahwa ini merupakan pertemuan pertama setelah pelantikan Presiden. Dalam teks ini koran Sindo menggambarkan Prabowo sebagai orang yang baik yakni walaupun kalah dalam pemilu, dia masih mau bersilaturahmi dengan Jokowi apalagi kali ini Jokowi sedang mendapat masalah akibat mencalonkan Budi Gunawan, walaupun Prabowo berdalih bahwa kedatangannya ingin bersilaturahmi dan juga ingin mengantar undangan untuk Presiden. Di sini sekali

lagi koran Sindo ingin menunjukkan bahwa Prabowo selain baik ingin menemui Presiden yang merupakan seorang lawan juga baik karena mau mengantar undangannya sendiri terlebih undangannya merupakan undangan pencak silat yang merupakan olahraga khas Indonesia dan merupakan tradisi dari dulu. Selain itu koran Sindo menggambarkan Prabowo sebagai warga yang mencintai Indonesia dan Nasionalis dengan memakai batik yang merupakan pakaian khas Indonesia dan juga menggunakan mobil dengan plat B17GRD yang berarti 17 sebagai hari ulang tahun Indonesia dan GRD merupakan Garuda yang mana merupakan lambang Indonesia. Penggambaran ini tentunya tidak terlepas dari peran HT yang merupakan pemilik media tersebut atas keterlibatannya dalam Koalisi Merah Putih sehingga ia mencitrakan Prabowo sebagai pribadi yang baik, tidak melupakan tradisi dan seorang Nasionalis.

Dilihat dari teks diatas koran Sindo menggunakan elemen **detail** yang merupakan strategi bagaimana wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara yang **implinsif**. Sikap atau wacana yang dikembangkan wartawan kadangkala tidak perlu disampaikan secara terbuka, tetapi dari detil bagian mana yang dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan detil yang besar, akan menggambarkan bagaimana wacana yang dikembangkan oleh media.

Berbeda dengan pencitraan mengenai Prabowo, citra mengenai Jokowi yang dibuat koran Sindo menggambarkan Jokowi tidak cinta dengan Indonesia, dengan pemberitaannya mengenai *Tolak Proton Jadi Mobil Nasional (Mesra dengan*

TKI, padahal TKI merupakan penyumbang devisa terbesar bagi bangsa Indonesia, yang seharusnya dibela. Bahkan koran Sindo menunjukkan bahwa Jokowi tetap melakukan kerja sama dengan Malaysia dengan menggandeng mobil Proton yang merupakan mobil buatan Malaysia untuk membantu mengembangkan mobil nasional. Padahal Hubungan Indonesia dan Malaysia tidak begitu harmonis, sebelum ada kontroversi iklan yang dibuat Malaysia mengenai pelecehan TKI, hubungan Indonesia dengan Malaysia tidak begitu baik karena pengakuan atas sering dilakukan Malaysia mengenai kebudayaan Indonesia dan ditambah tentang kontroversi iklan yang dibuat salah satu perusahaan Malaysia mengenai TKI, seharusnya Jokowi bersikap tegas terhadap Malaysia bukannya menjalin kerja sama.

Dilihat dari teks tersebut koran Sindo ingin mewacanakan bahwa Jokowi mesra dengan Malaysia sehingga menjalin kerjasama dengan Malaysia dalam pengembangan mobil nasional yang dibantu oleh pihak Proton. Koran Sindo mengatakan bahwa hal ini memalukan masyarakat Indonesia. Kedekatan antara pemilik media dengan Prabowo membuat koran Sindo mencitrakan Prabowo dengan sedemikian rupa, sehingga citra yang dirasa diperlukan untuk suatu tujuan yang akan digunakan.

Dalam mengkonstruksikan citra mengenai Jokowi, koran Sindo juga memaparkan mengenai kerja Jokowi. Yang mana diketahui bahwa slogan yang diusung Jokowi sewaktu kampanye selain Jokowi adalah kita adalah kerja, kerja

dan kerja, yang dimaksud bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan kerja bukan mencari citra. Koran Sindo mengangkat berita mengenai kerja Jokowi dalam salah satu beritanya mengungkap judul *Antara Kerja dan Citra* yang mana teks dalam berita tersebut :

Pada awal pemerintahannya Jokowi sudah memunculkan kebijakan pro dan kontra. Dimulai dari penyusunan lembaga yang bakal membantu tugas-tugas presiden ini muncul kontroversi. Saat mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi berjanji akan membentuk kabinet ramping. Nyatanya, Kabinet kerja jauh dari kata "ramping".

Tidak hanya itu, janji Jokowi yang tidak akan menerapkan politik bagi-bagi kursi di pemerintahan pun dipertanyakan mana kala nama-nama kabinet diumumkan . Nyatanya, Kabinet Kerja masih mengakomodasi orang-orang dari parpol pengusung, Beberapa diantaranya bahkan menduduki pos menteri strategis.

Gambar 3.8

Antara Kerja dan Citra



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Dua paragraf di atas menjelaskan bahwa pemerintahan Kabinet Kerja banyak menimbulkan Pro dan kontra dalam mengambil kebijakan. Bahkan pada awal pemerintahan, Jokowi sudah memiliki masalah yang banyak, koran Sindo juga menjelaskan bahwa dalam janji kampanye Jokowi, Jokowi berjanji akan membentuk pemerintahan yang ramping. **Leksikon** kata ramping disini berarti ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Tetapi koran Sindo mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi jauh dari kata ramping karena banyak masalah yang ditimbulkan karena adanya konflik internal yang berarti banyak yang berkepentingan di dalamnya. Pemaparan mengenai janji-janji kampanye Jokowi secara **ekplisit** dan jelas dilakukan koran Sindo untuk menunjukkan bahwa Jokowi hanya berjanji saja tetapi tidak terealisasikan. Janji-janji yang dibuat hanya berupa pencitraan agar mengundang simpatik masyarakat. Begitu juga dengan hal bagi-bagi kursi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK koran Sindo dalam janji-janji kampanye Jokowi-JK menjanjikan untuk tidak membagi kursi hanya pada koalisinya saja.

Koran Sindo mengambil berita mengenai turunnya elektabilitas Jokowi dimata publik. Dalam teksnya koran Sindo memberikan judul Kepercayaan *Publik Kepada Jokowi Terancam Menurun*. Menurut koran Sindo turunnya kepercayaan publik karena banyaknya masalah yang ditimbulkan dalam pemerintahan Jokowi terutama masalah KPK dengan Polri yang belum juga tuntas. Masyarakat sangat mengharapkan tuntasnya masalah KPK dengan Polri karena itu Jokowi harus

bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah ini, hal ini bisa menjadi *boomerang* terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Berikut teksnya:

Penyelesaian KPK–Polri sangat penting karena kinerja pemerintah Jokowi-JK dalam memberantas korupsi dalam kurun waktu tiga bulan ini menurun (Sindo, edisi 3477 hal 2).

Dalam teksnya koran Sindo mengemukakan bahwa turunnya kepercayaan publik terhadap Jokowi salah satunya karena kasus pencalonan Budi Gunawan menjadi ketua Polri, pencalonan Budi Goenawan merupakan usulan dari PDI-P tetapi menurut koran Sindo Jokowi yang bertanggung jawab atas pancalonan tersebut, sehingga Jokowi yang patut disalahkan.

Memang ada pengaruh parpor pendukung dalam rekrutmen kabinet ataupun Kapolri, namun keputusan akhir tetap di tangan Presiden. **Itulah konsekuensi Presiden yang bukan dari ketua partai. Jokowi mempunyai kekuasaan publik tapi tidak mempunyai kekuasaan *rill* politik** (Sindo, edisi 3477 hal 2).

Gambar 3.9

Kepercayaan Publik Kepada Jokowi Terancam Menurun



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Dilihat dari paragraf di atas koran Sindo ingin menegaskan bahwa partai tidak mempunyai andil dalam kasus ini, yang bertanggung jawab penuh adalah Jokowi, di sini koran ingin menekankan bahwa semua masalah yang ada di pemerintahan adalah murni kesalahan yang dilakukan Jokowi dengan alasan karena Jokowi bukan dari ketua partai, karena setelah era Soeharto presiden yang menjabat semua dari kalangan ketua partai hanya Jokowi yang bukan dari kalangan elite partai. Koran Sindo menganggap hal ini yang menjadi faktor terjadinya masalah politik di pemerintahan.

Diskursus yang dibangun koran Sindo tidak terlepas dari pengaruh politik pemilik media yang ingin mewacanakan bahwa seharusnya Prabowo yang menjadi presiden agar tidak adanya konflik politik di dalam pemerintahan. Penggunaan

elemen **detail** pada kalimat yang dicetak tebal di atas mempunyai maksud **implinsif** bila jika presidennya merupakan ketua partai maka dia akan memngusai keduanya baik kekuasaan publik dan kekuasaan politik tidak akan terjadi masalah tersebut.

Kepentingan pencitraan media massa sering terlibat dengan pemberian julukan (label) kepada para aktor dan atau kekuatan politik. Dalam konteks ini, para komunikator massa dalam rutinitas serupa dengan lembaga stempel yang member persetujuan (pembenaran) dan ketidaksetujuan dalam tindakan-tindakan politik. Di sini media massa bukan lagi sebagai saluran politik yang netral melainkan sebagai pihak yang menentukan format pesan politik, issue-issue politik bahkan citra para aktor politik. Bagi suatu kekuatan politik, sikap sebuah media, entah netral partisan adalah menentukan terutama untuk pencitraan opini publik. Sebab, di satu pihak dari ujung komunikasi politik adalah mengenai citra ini, yang banyak bergantung pada cara mengkonstruksi pada kekuatan politik itu. Sedangkan media massa mempunyai kekuatan yang signifikan dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak. Alhasil pencitraan yang dilakukan media akan memberikan dampak besar dalam menjangkau khalayak yang banyak (Hamad, 2004:29).

Wacana mengenai berita seratus hari kepemimpinan Jokowi-JK selalu menarik dan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat, terlebih suasana politik di pemilu 2014 sangat panas. Suasana politikpun tidak berubah walau pemilu 2014

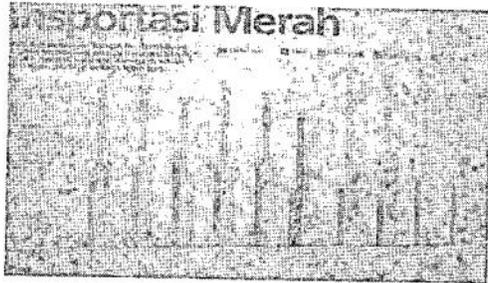
telah berakhir, suasana politik ditandai dengan banyaknya pro dan kontra mengenai pemerintahan tersebut. Pemilu memang salah satu bahasan yang paling menarik, dimana kita mengetahui bahwa rakyat Indonesia harus melalui berbagai era untuk mendapat Pemilu Jurdil seperti sekarang ini. Pemilu pertama kali digelar pada 7 Juni 1999 yang mana diikuti oleh 48 partai. Atas kebijakan Habibie mengenai kebebasan mendirikan partai ini MPR menetapkan Gus Dur dan Megawati sebagai pemenang pemilu. Pada pemilu 2004 terjadi keberhasilan kebijakan yang mana rakyat sendiri yang memilih langsung presiden. Tetapi gejala euphoria politik berbasis pilihan langsung menjadikan pemerintahan hanya berpusat dengan prinsip segala sesuatu yang serba masa sebagai bagian dari pencitraan (Nugroho dan Herliana, 2013:331). Oleh karena itu media massa sangat berperan penting untuk menciptakan citra yang baik bagi kelompoknya dan memunculkan citra yang buruk bagi kelompok saingannya ataupun mewacanakan berita menurut kepentingan masing-masing.

Tabel 3.1

Kinerja Kabinet Jokowi-JK

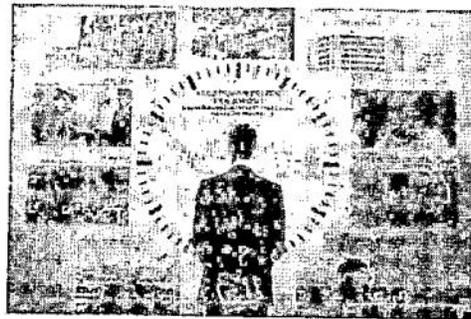
<i>Struktur</i>	<i>Elemen</i>	<i>Temuan</i>
<i>Wacana</i>		
Struktur Makro	Topik / Tema	Kinerja Kabinet Jokowi-JK
Super Struktur	Skema /Alur	Dimulai dari membahas mengenai menagih janji-janji kampanye, banyaknya janji yang tidak

		teralisasi, lalu momentum kerja kabinet, yang berujung pada menteri yang gagal perlu di <i>reshuffle</i> .
Struktur Mikro (Skematik)	Latar	Latar belakang yang ingin diangkat adalah buruknya pemerintahan karena banyaknya masalah, yang berimbas pada buruknya kinerja kabinet.
	Detail	Peneliti menemukan banyak kalimat yang menunjukkan bahwa kabinet Kerja memiliki banyak kendala seperti kendala masalah internal, kendala mengenai kebijakan yang kontroversial, kendala menteri yang tidak kompeten.
	Maksud	Dari detail yang disajikan, koran Sindo memiliki maksud bahwa kinerja Kabinet Kerja masih buruk.
Struktur Mikro (Sintaksis)	Bentuk Kalimat	Bentuk kalimat yang banyak digunakan adalah kalimat pasif: - <u>"Dalam bidang Politik kata Fadli, manajemen politik pemerinyahan kurang"</u> . - <u>"Presiden Jokowi menyambut antusias dukungan tersebut. Dia mengungkapkan</u> saat ini dirinya sedang mengikuti proses hukum, baik untuk Budi Gunawan maupun Bambang Widjojanto.

		<p>-Tedjo Edi mengungkapkan Kopolnas mendukung kebijakan yang diambil Presiden.</p> <p>- BJ Habibie meminta Jokowi tidak perlu khawatir dalam mengambil keputusan.</p>
	Koherensi	<p>- Evaluasi bukan hanya 100 hari, <u>yang</u> lebih penting adalah 1.815 hari kedepan.</p> <p>- Dibidang hukum awal tahun diramaikan oleh hukuman mati bagi terpidana narkoba. Lagi-lagi kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra.</p> <p>-</p>
Struktur Mikro (Stilistik)	Leksikon	<p>“menunggu”, “diminta”, “sudah”, “digenjot”, “Jalan ditempat”</p>
Struktur Mikro (Retoris)	Grafis	<p>-Bagan hasil polling Kinerja Kabinet</p>  <p>- Saat Jokowi berdiri membelakangi gambar sambil memegang agenda 100 hari.</p>



-Beberapa gambar mengenai Kontroversi Kebijakan Jokowi



Metafora

-Harapan besar diletakkan di pundak Jokowi.
-Wajar jika banyak yang menilai kebijakan Jokowi masih jalan ditempat.
- Komitmen ini ditunjukkan dengan menggenjot anggaran.

Tabel 3.2
Citra Jokowi

<i>Struktur Wacana</i>	<i>Elemen</i>	<i>Temuan</i>
Struktur Makro	Topik / Tema	Citra Jokowi
Super Struktur (Skematik)	Skema / Alur	Berita seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, adanya pro dan kontra dalam pemerintahan, banyaknya kontroversi yang terjadi, menurunnya elektabilitas Jokowi.
Struktur Mikro (Skematik)	Latar	Citra Jokowi menurun karena banyaknya kontroversi dan tidak terealisasinya janji-janji kampanye.
	Detail	Detail yang disajikan adalah bagaimana koran Sindo bermaksud menjabarkan janji-janji Jokowi yang tidak terealisasikan.
	Maksud	Maksud detail yang ditampilkan koran Sindo bahwa janji-janji kampanye dibuat untuk kerja atau hanya untuk pencitraan semata.
Struktur Mikro	Bentuk Kalimat	Bentuk kalimat yang banyak digunakan adalah kalimat aktif: -“Secara politik, saya kecewa wajar dong. Makanya

		<p>kita bertanya ini kabinet apa? Sekalinya jelek, PDIP yang menjadi sasaran. Kabinet Kerja enggak pernah mikir”.</p> <p>-“Saya sebagai orang partai kaget, saya protes keras mesti ada konsekuensi dianggap melanggar partai”.</p> <p>-“Saya katakan banyak suksesnya, tapi jujur ada juga yang kurang”.</p>
	Koherensi	<p>Memang ada pengaruh Parpol pendukung dalam rekrutmen kabinet ataupun Kapolri, <u>namun</u> keputusan akhir tetap di tangan Presiden.</p>
Struktur Mikro (Stilistik)	Leksikon	<p>“ramping”, “mikir”, “rill”</p>
Struktur Mikro (Retoris)	Grafis	<p>-Gambar Prabowo sedang masuk istana Presiden.</p>  <p>-Jokowi sedang berkumpul dengan Mahathir Mohamad melihat <i>prototype</i> mobil Proton.</p>

		
	Metafora	- Nyatanya, Kabinet kerja jauh dari kata "ramping".

2. Analisis Kognisi Sosial

Dalam pandangan Van Dijk, kognisi sosial dihubungkan dengan proses produksi berita. Titik kunci dalam memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya teks. Proses terbentuknya teks tidak hanya bermakna bagaimana suatu teks itu dibentuk, prosesnya juga memasukan informasi yang dapat membentuk suatu wacana seperti dari wawancara, laporan, konferensi pers, atau debat parlemen (Eriyanto, 2011:266). Pada pemberitaan mengenai seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, analisis kognisi digunakan untuk memberi gambaran bagaimana teks dikonstruksikan dan diproduksi.

Pemaknaan suatu peristiwa bisa dilakukan melalui pemahaman teks, sedangkan untuk mengetahui wacana dominan yaitu dengan melihat kepentingan yang ada dibalik teks. Salah satu metode untuk melihat kognisi dan konteks sosial

adalah dengan menggunakan interteks. Dalam proses memahami dan memaknai peristiwa sosial sangat bergantung pada kognisi sosial wartawan. Van Dijk mengungkapkan bahwa "*All processes of understanding and of social effects and functions are controlled by social cognitions of individual group members and entire group.*" (Van Dijk, news and discourse, www.Discourses.org diakses pada tanggal 12 September 2015 pukul 11.32).

Wartawan tidak dianggap sebagai individu yang netral tetapi individu yang memiliki kepercayaan, pengetahuan, ideologi, nilai dan pengalaman yang berbeda sesuai dengan kehidupannya. Tidak hanya pada kehidupannya, seorang wartawan dalam hal memproduksi berita tentunya bergantung juga pada media mana ia bekerja. Media tempat ia bernaung memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap cara serta strategi untuk menyampaikan suatu peristiwa. Pada dasarnya media seharusnya memberitakan dan menyampaikan realitas sosial yang terjadi kepada masyarakat. Tetapi dengan adanya bias di dalam media menjadikan media bergantung pada kepentingan yang ada di dalamnya. Jelas dalam paradigma kritis, jurnalis pada dasarnya dikontrol. Kontrol terbesar merupakan bagaimana menyajikan berita kepada khalayak. Berita berasal dari sebuah peristiwa yang mana akan dibentuk menjadi berita yang melibatkan ideologi profesional jurnalis, yang mana menentukan yang bisa, tidak bisa, bagian mana, dan dengan cara apa peristiwa tersebut diberitakan (Ishadi, 2014:18).

Adanya kepentingan-kepentingan media yang akan menentukan pola dan jenis pemberitaan yang ada di media. Kepentingan yang ada di media tentunya berkaitan erat dengan kepemilikan media tersebut. Relasi kuasa disini yang akan menentukan bagaimana isi pemberitaan media. Sebagai contoh dalam pemberitaan kejadian lumpur Lapindo, Viva News lebih menyukai menggunakan sebutan Lumpur Sidoarjo dari pada Lapindo. Padahal media yang lain menggunakan Lapindo untuk menyebutkan berita tersebut. Penggunaan lumpur Sidoarjo dari pada Lumpur Lapindo jelas berhubungan dengan kepemilikan Viva News dan Lapindo yang merupakan perusahaan dari Abu Rizal Bakri. Hal lain juga disampaikan oleh Kompas dan Republika dalam menggambarkan peristiwa Amrozi cs dalam peristiwa bom Bali juga menggambarkan bagaimana ideologi dan kepemilikan media sangat mempengaruhi isi suatu pemberitaan. Bagi Kompas eksekusi mati Amrozi cs merupakan persoalan hukum positif yang harus dijalankan, sementara Republika mengedepankan paradigma humanistik sehingga menganggap hukuman mati sebagai sesuatu yang tidak manusiawi (Walisongo, volume 20 tahun 2012 http://eprints.walisongo.ac.id/1933/1/Ilyas_Supena-Mujid_versus_Teroris.pdf diakses pada tanggal 8 November 2015 pukul 20.11).

Menurut Brian McNair ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media yang pertama, pendekatan politik ekonomi (*the political-economy approach*). Pendekatan ini menjelaskan bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelola media. Faktor-faktor

seperti pemilik media, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud media. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan.

Kedua, pendekatan organisasi (*organisational approach*). Pendekatan ini melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita. Dalam pendekatan ini, berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. Praktek kerja, profesionalisme, dan tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur-unsur dinamika yang mempengaruhi pemberitaan. Proses produksi berita adalah mekanisme keredaksian semata, di mana setiap organisasi berita mempunyai pola dan mekanisme tersendiri untuk memberitakan suatu peristiwa.

Ketiga, pendekatan kulturalis (*culturalist approach*). Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan ekonomi politik dan pendekatan organisasi. Proses berita di sini dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan *factor internal* media (rutinitas organisasi media) sekaligus juga faktor eksternal media (Sudibyo, 2001:2). Media sering disebut sebagai kekuatan keempat dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, hal ini tentu dipengaruhi karena media berkaitan dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat.

Koran Sindo merupakan salah satu koran nasional di Indonesia yang mana memiliki kepentingan dan ideologi yang dianut. Relasi kuasa yang dimiliki HT

tentunya menentukan bagaimana berita diwacanakan. Dalam hubungannya dengan pemerintahan tentunya HT selaku pemimpin media dan seorang politisi memiliki maksud dan tujuan tertentu. Keterlibatan HT dengan partai politisi membuat media tidak lagi menjadi pengontrol pemerintah tetapi media melakukan wacana tertentu karena adanya perintah dari pihak yang dominan. Keterlibatan HT dengan KMP tentunya membuat berita mengenai isu pemerintahan menjadi berita yang sarat dengan kepentingan. Berita yang ada pun merupakan berita yang telah dikonstruksikan dengan sedemikian rupa. Untuk mempertegas kognisi sosial koran Sindo, berikut pernyataan Hari Tanoesoedibyo bahwa koran Sindo memang mengkritisi kinerja pemerintah Jokowi-JK.

Hary Tanoesoedibjo Sentil Pemerintahan Jokowi-JK



Jakarta, HanTer - Kinerja menteri-menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum terlihat. Mereka masih bermain dengan wacana yang tak kunjung terealisasi.

Begitu dikatakan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo usai acara dialog kebangsaan bersama akademi, ekonom dan kebijakan publik dari berbagai daerah di Rumah Makan Horapa, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/6)

"Eksekusinya lambat dan kurang mengena di sasaran. Itu fakta yang dihadapi. Padahal janji-janji politik Jokowi ini sangat menjanjikan diawal," jelas dia.

Menurut Hary, saat berkeliling ke daerah, dirinya melihat nelayan, petani dan juga buruh malah semakin menjerit. Salah satu faktor yang paling bisa terlihat adalah naiknya harga kebutuhan bahakn pokok. Ditambah lagi pengangguran pun saat ini sudah mulai banyak menghantui masyarakat.

"Saya juga melihat kehidupan masyarakat marjinal masih jauh tertinggal, kesenjangan tinggi. Tapi sayang menteri dan presiden lambat jalani reformasi birokrasi. Akhirnya program pemerintah pun terbengkalai," bebernya.

Tak hanya itu, menurut Hary, tidak adanya kepastian hukum dan kepastian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga dirasakan imbasnya terhadap pelaku usaha. Dia pun berkesimpulan jika saat ini dibutuhkan tim ekonomi yang mempunyai kapasitas mumpuni.

"Kita perlu tim ekonomi yang punya integritas dan kapasitas. Indonesia perlu solusi, kalo dia punya kapasitas, berarti dia punya kompetensi. Harus diingat itu. Jdi tim yang betul-paham akan persoalan bangsa kita dan bagaimana menyelesaikannya," tambah Hary.

Lebih lanjut, pengusaha nasional sekaligus pemilik media ini menilai dibalik lemahnya tim ekonomi ada masalah serius dalam hal leadership presiden Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Kita harus punya kepemimpinan yang kuat dan bisa cepat menyelesaikan masalah saat ini. Presiden harus bisa menyatukan team work yang solid," jelas Hary.

Ketika ditanya Presiden Jokowi dan tim ekonomi gagal, ini jawabannya. "Saya belum bisa nyebut gagal, tapi lemah," seloroh Hary.

([http://www.harianterbit.com/hanterpolitik/read/2015/06/25/33383/84/41/Hary-](http://www.harianterbit.com/hanterpolitik/read/2015/06/25/33383/84/41/Hary-Tanoesoedibjo-Mulai-Sentil-Pemerintahan-Jokowi-JK)

[Tanoesoedibjo-Mulai-Sentil-Pemerintahan-Jokowi-JK](http://www.harianterbit.com/hanterpolitik/read/2015/06/25/33383/84/41/Hary-Tanoesoedibjo-Mulai-Sentil-Pemerintahan-Jokowi-JK) diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 21.15)

Pernyataan politik Hari Tanoesoedibjo dapat dijadikan acuan dalam melihat kognisi sosial dari koran Sindo. Hal ini disebabkan posisi HT sebagai pemilih media yang mana merepresentasikan pandangan politik redaksi medianya. Hal lain yang dapat dilihat adalah pada pemberitaan koran Sindo dalam edisi 3 Februari 2015. Wartawan menulis mengenai survei kinerja 100 hari yang mana mengatakan

kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi akan terus menurun jika berbagai masalah yang ditangani tidak juga menemukan jalan keluar. Padahal pada tanggal 2 Februari telah dilakukan polling dan sebagian besar masyarakat mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Disini terlihat bagaimana wartawan tidak hanya menggunakan kognisi mentalnya tetapi juga bergantung pada kepentingan dan ideologi media yang mempekerjakannya.

Faktor kepemilikan dan hubungan antara koran Sindo dengan KMP, maka tidak heran jika dalam melakukan pemberitaannya koran Sindo cenderung memarjinalkan pemerintahan Jokowi-JK. Pemberitaan yang menyangkut pemerintahan Jokowi-JK diproduksi dengan sedemikian rupa agar khalayak mau menerima ide atau gagasan tersebut. Dalam hal ini wartawan Sindo banyak melakukan praktek kewacanaan yang mendukung keberpihakan terhadap kelompok yang memiliki dominasi terhadap media tersebut. Berita mengenai seratus hari pemerintahan Jokowi-JK di koran Sindo dikemas dengan menggunakan bahasa yang jelas eksplisit, dan menggunakan kalimat langsung hal ini digunakan agar menambah keyakinan khalayak.

3. Produksi Berita

Proses pembuatan berita politik berkembang melalui saling lingkup berbagai pengaruh. Baik pengaruh organisasi berita, proses pengumpulan berita dan penyajian berita. Organisasi berita merupakan badan usaha yang personalnya

mengumpulkan, menyunting, dan menyebarkan laporan serta evaluasi tentang peristiwa. Banyak organisasi berita yang mempunyai jaringan struktur yang besar dan kompleks yang mana terdiri dari berbagai macam media seperti televisi, radio dan sebagainya. Hal ini yang menjadikan organisasi berita menjadi organisasi birokrasi padahal sebenarnya organisasi berita tidak begitu birokratis. Tunstall mengemukakan penyimpangan organisasi berita dari model birokratis karena sifat pekerjaannya, yaitu merutinkan yang nonrutin. Beberapa aspek organisasi berita sebagai birokrasi nonrutin yang mempengaruhi perannya dalam pembuatan berita seperti nilai, prosedur, ritual, dan ekonomi organisasi (Nimmo, 2008:222).

Poin nilai dimaksudkan bahwa dalam setiap organisasi berita terdapat seperangkat nilai yang dominan yang menjadi pedoman pemilihan kebijakan, terutama dalam pemilihan berita. Dalam ritualisasi berita dijelaskan bahwa media memiliki kecenderungan politik organisasi. Dalam hal ini pemilik media memiliki pengaruh besar yang dapat menentukan pemilihan berita, karena pada dasarnya media dipengaruhi oleh ideologi yang dianut dan kebijakan pemilik media.

Diketahui bahwasannya pemilik Koran Sindo selain sebagai seorang pembisnis merupakan seorang politisi yang mana pasti memiliki ideologi sendiri yang dapat mempengaruhi medianya. Dalam hubungannya dengan proses pembuatan berita politik pasti memiliki dominasi tertentu, entah yang menyangkut mengenai koalisi partainya ataupun oleh koalisi di luar partainya. Media massa

mencoba untuk mengatur dan memberikan legitimasi lebih besar kepada suatu ide pihak tertentu dibandingkan dengan ide pihak lainnya (Devereux, 2003:100).

Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan berita politik di koran Sindo. Peneliti mewawancarai Ainun Najib selaku wartawan, redaktur nasional dan kini kepala redaksi Sindo Yogyakarta. Pada wawancara yang dilakukan ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan yang pertama, bagaimana porsi pemberitaan berita politik pada pemerintahan SBY dan Jokowi, beliau menyatakan:

"Kalo dibikin apple-to-apple kan gak bisa, karena SBY jelas dua periode sedangkan Jokowi baru beberapa bulan, kalo dihitung dari prosentase berita pastikan ya berbeda. Tetapi sejauh ini mediakan merupakan mitra kritis pemerintah termasuk Sindo, jadi yang perlu dikritisi ya dikritisi. Cuma disini Sindo tidak asal mengkritisi, istilahnya kita memakai jurnalis soul tips. Ketika kita mengkritik sesuatu kita juga menawarkan solusi. Bisa dengan minta pendapat pakar atau dengan yang lainnya. Saya pikir sama pemberitaannya" (Wawancara dengan Ainun Najib, 07 Oktober 2015).

Porsinya tidak diketahui karena SBY sudah menjabat selama 10 tahun sedangkan Jokowi baru beberapa bulan, tetapi yang jelas media Sindo bukan hanya mengkritik tetapi juga menawarkan solusi kebijakan. Tentunya setiap kritikan dan solusi tersebut dapat dilihat dari sikap partai yang menyokongnya. Hal ini juga memungkinkan adanya wacana yang dilakukan koran Sindo dalam keterkaitannya dengan Pilpres 2019. Kemudian berlanjut dengan pertanyaan, dalam pemberitaan politik seberapa besar peran pimpinan redaksi dalam menentukan berita tersebut layak cetak.

"Sebelum jadi kepala redaksi disini saya juga jadi redaktur di Jakarta jadi saya paham betul bagaimana kita memilih dan memilah berita. Jadi sebenarnya Sindo Jogja ini yang ngerjain Sindo Jakarta. Jadi wartawan kirim berita dan disana dipilah beritanya. Untuk terkait peran pimpinan redaksi jadi kita ini tim. Alur kerjanya pagi saya selaku redaktur Jogja menugaskan wartawan untuk mencari berita yang mau kita kejar. Siang sekitar jam dua saya listing wartawan, si A beritanya apa si B beritanya apa, nah budget berita ada beberapa berita ini kita pilah-pilah terus kita kirim ke Jakarta. Disana ada tim redaktur nanti dilihat-lihat lagi kemudian dirapatkan. Kan Sindo banyak jadi selain Sindo nasional ada 10 Sindo daerah, perwakilannya ada semua disana, nanti rapat disana. Kemudian dilihat berita apa saja disetiap daerah misalnya wacana mengenai Gubernur perempuan di Jogja, Risma tidak memiliki lawan di Surabaya kemudian kita rapatkan dan tentukan Jogja hal 1 ini. Jika ada berita kurang lengkap nanti pusat menghubungi kepala biro di daerah kemudian kepala biro menugaskan wartawan untuk melengkapi. Begitu juga di nasional, harus ada budgeting berita, pimpinan redaksi tidak boleh memutuskan sendiri semua berdasarkan diskusi. Misalnya berita mengenai Ahok, oh berita ini layak menjadi hal 1, tetapi jika masih kurang narasumber ya cari narasumber lagi dan jika beritanya tidak berimbang maka harus ditambahkan. Nah jika malam kita disuruh melanjutkan berarti terus dilanjutkan. Jadi hampir tim kerjanya bukan terus pimpinan redaksi mau ini ya harus ini. Kita kerja tim jadinya untuk menentukan semua pimpinan redaksi ada untuk menentukan yang lebih aktif wakil pimpinan redaksi sama redaktur pelaksana. Soal pilihan pimpinan redaksi misalnya gak suka dengan pilihan tim, dia gak punya hak veto artinya tetep diskusi diargumen situ, jadi ketika pimpinan redaksi berargumen dan orang-orang bisa menerima ya bisa diganti" (Wawancara dengan Ainun Najib, 07 Oktober 2015).

Kerja tim yang ditonjolkan dalam pemilihan berita, peran pimpinan biro redaksi dipengaruhi oleh rapat para redaktur di Jakarta dengan berbagai kepala biro. Jika ada yang kurang maka yang nasional akan menghubungi biro redaktur di daerah untuk melengkapi. Kemudian baru ditentukan mana yang kiranya naik cetak dan pantas berada dihalaman depan. Tetapi balik lagi dengan adanya kepentingan yang ada di koran Sindo tersebut. Prinsip profesionalisme dan aturan kerja redaksi (seperti *deadline* dan pembagian tugas liputan) merupakan bagian

dari kontrol dan bentuk pendisiplinan, kebebasan jurnalis dibatasi dengan berbagai kontrol dan konsep yang membuat ia hanya menjadi “sekrup” dari sistem yang sebetulnya menindas (Ishadi, 2014:17).

Realitas yang sebenarnya berita yang ditayangkan mempunyai nilai yang layak jual tentunya. Proses pembuatan berita politik berangkat dari realitas fakta yang memiliki nilai berita. Fakta tersebut bisa berupa peristiwa atau pun pendapat, namun menurut Nimmo fakta dibatasi atau dipengaruhi oleh pengaruh organisasi, nilai, ritualisasi berita, pengolahan berita, konflik dan kontrol, dan pertimbangan ekonomis (Harahap, 2013:39). Bukan hanya sekedar beredar untuk menyebarkan informasi tetapi juga ada beberapa kepentingan dalam menentukan apakah berita itu layak cetak ataupun tidak.

Keberadaan biro di daerah yang dituturkan oleh Pak Ainun di atas, merupakan perwujudan sebagai perwakilan berita yang berasal dari daerah. Biasanya surat kabar daerah berisi mengenai isu-isu dan kejadian yang ada di daerah tersebut, dan surat kabar daerah biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain. Biasanya surat kabar daerah memuat 60-70% berita daerah dan sisanya merupakan berita yang sedang *booming*. Jika dulu surat kabar daerah merupakan remah-remah yang tersisa dari media cetak nasional, pada penghujung 1980-an kecenderungan tersebut berubah total. Asumsi selama ini runtuh seiring dengan munculnya sederet jagoan daerah. Tak cuma mengimbangi tetapi mereka bahkan menang dalam persaingan. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan ekonomi di setiap daerah

yang memungkinkan surat kabar daerah merambah wilayah pasar baru (Hill, 2011:144).

Fenomena pers di daerah berkembang setelah Grafiti mengambil alih harian Surabaya *Jawa Pos*. Di tangan Kepala Biro Surabaya Dahlan Iskan, *Jawa Pos* Jawa Timur mampu melejit menjadi satu dari 200 perusahaan terbaik di Indonesia. Berikutnya, kelompok *Jawa Pos* membeli saham dan mengambil alih beberapa surat kabar di daerah (Hill, 2011:107). Cerita sukses imperium *Jawa Pos* dari Jawa Timur menjadikan cikal bakal banyaknya surat kabar daerah, baik surat kabar berskala kecil maupun surat kabar yang bergabung dalam imperium pers nasional, seperti Koran Sindo yang mempunyai beberapa biro yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan surat kabar daerah (termasuk yang bergabung dalam imperium pers nasional) sebagian besar dipengaruhi oleh loyalitas ke daerah. Adanya masa otonomi daerah membuat mau tidak mau, kepentingan daerah meningkat dan daerah bisa dengan leluasa mengeksplor kebijakan sendiri, hal ini menjadikan masyarakat lebih menyukai isu-isu yang ada didaerah.

Adanya surat kabar daerah yang bergabung dalam imperium pers nasional membuat isi dari surat kabar tersebut bercampur dengan berita yang ada di ibukota, hal ini dimanfaatkan pemerintah pusat untuk alat regulasi ke daerah, dilihat dari segi isi membuat surat kabar daerah tidak ada bedanya dengan surat kabar nasional. Hal ini sama dengan jurnalisme copy paste yakni surat kabar mengabarkan berita yang sama persis.

Keberimbangan berita yang disebutkan oleh pak Ainun di atas juga termasuk dalam pemilihan narasumber, pemilihan narasumber bukan hanya sebagai penguat sebuah berita tetapi bisa menentukan mau diberitakan seperti apa berita tersebut. Di sini peneliti menanyakan mengenai narasumber yakni dalam pemilihan narasumber apakah ada kriteria dari kepala redaksi ataukah terserah wartawannya sendiri.

"Biasanya kita dua arah, wartawan biasanya kalo udah yang senior yang udah lama dia sudah tau linknya, misalnya dia bikin berita saat dia di listing ketahuan misalnya ada kisruh tentang pertanahan misalnya antara PKL dan pemilik kekancingan pengusaha bermodal besar. Disini wartawan membikin berita ada sumber dari keraton ada sumber dari PKL artinya gak kamu harus nyari narasumber ini dan ini gak seperti itu. Ya dua arah, tetapi ketika narasumber dianggap gak layak ya kita minta ganti, mencari narasumber yang kompeten. Misalnya kaya kita ngomongin masalah pendidikan ya narasumbernya guru atau dosen gak ya malah petani atau buruh" (Wawancara dengan Ainun Najib, 07 Oktober 2015).

Pengambilan narasumber terjadi dua arah artinya wartawan bisa berinisiatif sendiri tetapi jika tidak pas maka pimpinan redaksi juga mengusulkan. Narasumber bisa berperan sangat besar dalam arti dari berita tersebut, siapa narasumbernya akan menunjukkan suatu berita yang akurat. Menurut Van Dijk keputusan pengambilan satu sumber berita, dibanding sumber yang lain merupakan strategi wacana yang dapat digunakan (Eriyanto, 2001:269).

Koran Sindo merupakan koran nasional yang mana membahas mengenai berbagai macam berita, adakah porsi yang diberitakan koran Sindo menyangkut

pemberitaan politik di koran tersebut. Berapa persen porsi pemberitaan politik dibanding dengan pemberitaan sosial, budaya dan ekonomi.

“ Kita memiliki rubrik yang mana mewakili sebuah pemberitaan seperti contohnya ini koran hari ini didalamnya ada politik, olahraga, bisnis, iklan, local atau hal-hal yang menarik. Jadi kalo masalah prosentase ya berapa kira-kira, saya gak tau, yang jelas tiap section ada bagiannya masing-masing” (Wawancara dengan Ainun Najib, 07 Oktober 2015).

Menurut Ainun Najib dalam peliputan berita koran Sindo selalu memberitakan hak jawab dalam satu berita. Ada beberapa koran yang menyertakan hak jawab di edisi selanjutnya. Sedangkan koran Sindo sebisa mungkin harus menyertakan hak jawab di setiap beritanya. Hal ini berkaitan pada kebenaran berita, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam pemberitaan, sehingga koran Sindo mengharuskan adanya hak jawab dalam setiap pemberitaannya.

Kita mengetahui bahwa ada keberpihakan media terhadap golongan tertentu, hal ini menjadikan adanya bias dalam media. Bagaimana tanggapan koran Sindo dalam menanggapi adanya keberpihakan di media, berikut pernyataannya:

“Saya ilustrasikan seperti ini ada kecelakaan didepan ada ibu-ibu bawa anak nabrak becak jatuh berdarah-darah gara-gara becaknya parkir ditengah. Satu media ceritakan berdarah-darahnya dulu angelnya dari sisi ibunya. Adalagi media menulis tukang becak kurang ajar parkir ditengah jalan itukan sudah beda. Jadi sebenarnya menurut saya itu hanya angel aja, walaupun tidak dipungkiri media memiliki politik media masing-masing. Tetapi dari sisi profesionalisme kami, gak bisa dong asal salah ntar ditegur Dewan pers. Seperti di televisi juga gak bisa asal salah pasti ada yang mengawasi kaya KPI. Jadi jika ada orang bilang cenderung kesini cenderung kesana, menurut saya cuma bagaimana mengolahnya saja” (Wawancara dengan Ainun Najib, 07 Oktober 2015).

Media memang memiliki politik medianya sendiri, perbedaan pemberitaan hanya masalah proses pengambilan berita tetapi tentunya dalam sebuah organisasi berita pasti ada ideologi yang mendasari yang mana harus diterapkan dan dilakukan oleh semua yang berada didalamnya. Seperti pernyataan bahwa berita dipilih oleh tim redaktur yang mana terdiri dari beberapa orang sehingga tidak dapat memilah berita dengan sesuka hati atau karena suatu kepentingan, tetapi tentunya walaupun ditentukan oleh sebuah tim tetapi tim itu bernaung dalam perusahaan yang sama bukan tidak mungkin bila tim tersebut memiliki ideologi yang sama. Ideologi tersebut digunakan tim untuk membentuk wacana dalam setiap pemberitaannya, yang mengacu pada relasi kuasa yang dimiliki oleh ketua korporasi berita tersebut yakni HT untuk merealisasikan tujuannya yakni mempengaruhi masyarakat dengan wacana yang dibuat koran Sindo dalam pemberitaan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK agar tingkat kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap pemerintahan turun, dan hal ini bisa menguntungkan HT sebagai ketua partai Perindo untuk memperoleh suara yang lebih banyak dalam wacana PILPRES 2019 nanti.

4. Analisis Konteks Sosial

Analisis sosial ini didasari pada wacana yang berkembang dalam masyarakat, yang mana dapat mempengaruhi bagaimana wacana dimunculkan dalam media. Dalam tradisi kritis, keadaan sosial yang menjadi objek penelitian perlu diulas lebih lanjut.

Media erat hubungannya dengan politik, selama ini media diyakini sebagai pembangun opini publik atau pendapat umum yaitu upaya membangun sikap atau tindakan khalayak mengenai sebuah masalah politik atau pembicaraan politik. Relasi media dan politik selama ini dihadapkan dengan dilema, dalam perspektif demokrasi media diyakini sebagai *fourth state* yang berperan sebagai lembaga kontrol bagi pelaksanaan *good corporate governance*. Dalam konsep negara demokrasi media merupakan stimulator bagi terciptanya *civic society*, yang bertugas untuk memperluas peran warga negara dalam mengambil keputusan dan partisipasi politik (Indrayani, 2009:129). Dalam sejarah kemerdekaan media massa terutama dalam bentuk cetak seperti brosur, koran, majalah penting dalam komunikasi politik yang dilakukan oleh para tokoh pergerakan. Mereka menulis di berbagai media massa, terutama yang diterbitkan oleh organisasi penggerak untuk menjangkau khalayak yang lebih luas (Junaedi, 2013:50).

Dilihat dari sejarah politik Indonesia, dinamika pers berubah-ubah mengikuti perkembangan sistem politik. Pada masa politik transisional kehidupan pers merupakan saat-saat pembenahan. Kebebasan pers bertambah besar ketika sistem politik beralih ke sistem demokrasi liberal, pada masa itu surat kabar memiliki hubungan tertentu dengan satu partai politik. Pada masa demokrasi terpimpin pers dijadikan alat politik oleh pemerintahan ketika itu. Pengaruh kekuatan politik terus membayangi pers Indonesia setelah orde lama tumbang dan dimulai orde baru. Pada saat itu pemerintah membuat kebijakan mengenai Surat Izin Terbit (SIT)

untuk kalangan pers. Tetapi kebijakan itu menimbulkan kontroversi akibat terlalu besar pertimbangan politik. Walaupun akhirnya tidak dibutuhkan SIT tetapi pada pelaksanaannya muncul ketentuan agar semua penerbit pers harus mempunyai SIT dan Surat Izin Cetak (SIC). Pihak yang mengeluarkannya bukanlah Menteri Penerangan tetapi Laksus Kopkamtib sebuah instrumen kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan adanya dua surat izin tersebut penguasa Orde Baru sangat mudah memantau pers (Nugroho dan Herlina, 2013:81).

Pembredelan penerbitan pers yang sejak jaman kolonial hingga jaman kemerdekaan menjadi ciri utama campur tangan kekuasaan terhadap pers. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 1978 merupakan tonggak pengokohan dari pelaksanaan kekuasaan melalui mekanisme *bureaucratic* oleh penguasa Orde Baru, yaitu pemusatan kekuasaan di tangan segelintir elite setelah menghabisi semua kekuatan politik saingan. Gurita kekuasaan menguasai berbagai sektor tak terkecuali sektor komunikasi. Kenyataannya penguasa Orde Baru dalam hal ini Soeharto, relative sendiri saja memerintahkan Indonesia termasuk dalam mengendalikan media massa, sampai dijatuhkan oleh Gerakan Reformasi tahun 1998.

Era baru dalam pers Indonesia terjadi ketika UU Pokok Pers No.11/1966 jo No.4/1967 dirubah menjadi UU Pokok Pers No. 21/1982. Perubahan ini sekaligus menjadikan pers Indonesia mulai bermain bisnis sebagaimana diamanatkan oleh

UU diatas, yaitu tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP (Hamad, 2004:64).

Perkenalan pers Indonesia dengan bisnis semakin akrab setelah keluarnya peraturan Menteri Penerangan tentang SIUPP. Sejak itu pengelolaan pers tak ubahnya dengan mengelola bisnis lainnya sehingga mengaburkan makna idealisme yang selama ini menjadi ciri pers Indonesia.

Kehadiran SIUPP menjadikan lahirnya kelompok-kelompok perusahaan media yang bermodal kuat. Dengan kekuatan modal mereka dengan mudah mendapatkan SIUPP dari Departemen Penerangan atau membeli SIUPP surat kabar lain yang kehabisan modal untuk bertahan hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, akibat perubahan UU Pokok Pers, interaksi yang terjadi bukan lagi antara insan pers dan pemerintah melainkan antara Pengusaha Media dan Penguasa Politik. Kedua belah mencoba meraup keuntungan masing-masing.

Datangnya era reformasi sebetulnya tidak begitu banyak pengaruh terhadap struktur kepemilikan atau konglomerasi media. Kebebasan pers sebagai salah satu buah dari Gerakan Reformasi justru menambah rasa aman bagi pengusaha media. Karena dicabutnya lembaga SIUPP pada pemerintahan BJ. Habibie maka hilanglah sama sekali kecemasan para pengusaha media dari ancaman pembredelan. Apalagi pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan ditiadakan, maka industri media di Indonesia berlangsung melalui

mekanisme pasar. Puncaknya adalah keterbukaan pers Indonesia terhadap modal asing. Pergulatan pers dengan sebuah rezim seolah telah usai, pada masa reformasi, pers sepenuhnya bergulat dengan pasar yang semakin membuat kelompok-kelompok media yang sudah mapan.

Setelah jatuhnya Orde Baru, ratusan surat kabar tumbuh di Indonesia. Ketika gerakan reformasi datang dengan membebaskan pers dari belengu politik, pers Indonesia semakin leluasa mengekspresikan keyakinan politik tanpa harus takut usahanya akan dicabut. Bahkan sejumlah media terkesan jor-joran memberitakan tokoh-tokoh dan partai-partai politik, baik mendukung maupun yang diserang. Kepentingan media pun lantas berbaur dengan kepentingan usaha mereka.

Adanya pembredelan pada era Orde Baru membuat bangkitnya perusahaan-perusahaan pers di tanah air. Pembredelan yang dilakukan pada Orde Baru tidak membuat para pelaku bisnis pers jera. Hal ini justru menjadikan semangat untuk mengadopsi cara dan hitung-hitungan baru yang lebih pragmatis dan bernilai bisnis. Di permulaan kurun waktu 1990-an, media tampil sebagai investasi yang makin lama makin menarik. Sejarah dan perkembangan perusahaan pers besar yang tumbuh di masa Orde Baru menggambarkan tentang sederet perubahan dalam industri pers, khususnya bangkitnya beberapa imperium pers dan tumbangnyanya satu demi satu surat kabar-surat kabar independen yang berskala kecil.

Munculnya dua perusahaan pers besar yakni kelompok Kompas Gramedia dan Kelompok Sinar Kasih. Kedua surat kabar tersebut merupakan surat kabar dari komunitas yang berhasil membuktikan ke publik bahwa penerbitan pers tidak hanya bisa sukses apabila bergandeng tangan dengan partai politik atau kelompok sektarian lainnya. Sedangkan kelompok Tempo-Grafiti/Jawa Pos menjadi simbol ketidakpastian nasib sebuah perusahaan pers. Tetapi disamping itu perusahaan pers ini menjelma sebagai salah satu perusahaan yang memiliki sejarahnya sendiri yang menjadikan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kelompok Media Indonesia adalah salah satu cerita sukses sebuah sindikasi nasional. Sindikasi berorientasi bisnis ini berhasil menggabungkan surat kabar kecil independen di bawah sebuah payung perusahaan. Kelompok ini erat hubungannya dengan sederetan kepentingan politik dan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru (Hill, 2011:95).

Masa Orde Baru tidak hanya memunculkan konglomerat-konglomerat pers saja, tetapi juga melahirkan para pemain baru di dunia pers Indonesia. Para pengusaha pribumi Indonesia mulai ikut menanamkan modalnya secara besar-besaran ke dalam bisnis ini, contohnya Sutrisno Bachir yang menjalin kesepakatan dengan Berita Buana. Kemudian ada Abu Rizal Bakrie yang menanamkan modalnya ke majalah *Popular* dan harian *Pelita*. Kekuatan modal yang mereka punya dalam industry pers merupakan keberhasilan mereka dalam sejumlah usaha yang lain. Sedangkan perusahaan pers yang kecil hanya menggantungkan sejumlah peluang

lewat Keputusan Presiden dan menggantungkan bantuan dari Menteri Peningkatan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri. Karena adanya sistem di atas, tidak bisa dipungkiri bila MNC Group yang merupakan perusahaan pers baru bisa dengan mudahnya mencapai kesuksesan sampai mempunyai konglomerasi media yang besar baik di media cetak, elektronik maupun online. Hal ini tidak lepas dari peran HT sebagai seorang pengusaha yang memiliki modal yang besar dalam mengelola mediannya.

Tidak semua surat kabar menjadi corong organisasi politik, tetapi beberapa diantaranya menjadikan dirinya organ sebuah partai atau organisasi politik. Keterlibatan media massa dengan kegiatan yang diberitakan entah kepentingan politik tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik, malainkan menyiratkan pula adanya ketertarikan atas dasar suatu kepentingan antara sebuah media dan kekuatan politik yang diberitakannya entah itu kepentingan ekonomi, politik, ataupun ideologis (Hamad, 2004:71).

Media massa terutama koran menjadi sarana partai politik untuk menggerakkan aktivitas komunikasi politiknya. Salah satunya adalah koran Sindo, kepemilikan koran Sindo di tangan politisi maka tak dapat dipungkiri bahwa koran Sindo menjadi salah satu surat kabar yang berbasis pada organisasi politik .

Isi pesan dalam bentuk berita, *frame* dan diskursus yang dimunculkan berhubungan dengan organisasi tersebut merupakan penjabaran dari berbagai

macam kepentingan yang “terseleksi” yakni isu-isu yang dimuat dapat saling mempengaruhi (saling mengendalikan) agenda media mengacu kepada agenda khalayak dan agenda khalayak dibentuk oleh agenda media dalam rangka memuluskan kepentingan tertentu (Harahap, 2013:6).

Tak dapat dihindari lagi jika dalam melakukan konstruksi wacana mengenai seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, koran Sindo membangun realitas kelompok, representasi dan mengatur cara pandang publik terhadap pemberitaan tersebut menurut konstruksi ideologi medinya. Di mana pemberitaan tersebut merupakan pemberitaan penting yang mana melibatkan berbagai kepentingan kelompok dominan. Tidak hanya sebagai wadah organisasi politik untuk menyampaikan kepentingannya, dalam kepentingan ekonomi politik media massa digunakan sebagai kendali pasar media massa yang mana ditentukan kekuatan pasar. Melalui pengendalian pasar akan terlihat faktor mana yang lebih dominan dalam menentukan isi media. Faktor tersebut bisa berupa sumber berita, pemilik ataupun pengiklan, hal ini menyesuaikan bentuk dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai desain pelaku media (Harahap: 2013:2).

Wacana yang dimunculkan koran Sindo merupakan bentuk upaya koran Sindo untuk mempengaruhi khalayak agar setuju dengan realitas yang diwacanakan yang akan berdampak pada penerimaan ideologi. Jika suatu ideologi atau gagasan sudah tersebar kepada khalayak, maka dengan mudah suatu media yang memiliki kepentingan tertentu dapat melancarkan tujuannya. Media massa yang dekat

dengan pemerintah akan dianggap cenderung membela kepentingan pemerintah, sedangkan media massa yang berada di pihak oposisi akan cenderung mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa. Begitu juga pemilik media yang memiliki media ataupun kedekatan dengan partai politik akan mempengaruhi isi medianya dengan partai politik yang bersangkutan (Junaedi, 2013:101).

Salah satu contoh adalah berita-berita yang ditampilkan oleh koran Sindo dalam pemberitaan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK yang mana dalam edisi tanggal 2 Februari 2015 koran Sindo membuat rubrik khusus mengenai 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK dengan tema 100 hari Sarat kontroversi.

Gambar 3.10

100 Hari Sarat Kontroversi



Sumber: (Koran Sindo 2015)

Edisi ini koran Sindo hanya membahas mengenai kebijakan Kontroversi, janji-janji yang tidak terealisasi, citra buruk kabinet Kerja dan banyaknya masalah birokrasi yang mana hampir semua dari berita yang disajikan merupakan hal negatif yang ada di pemerintahan. Terlebih koran Sindo hanya menyoroti pada sosok Jokowi seperti pada salah satu judul berita dalam edisi “100 Hari Sarat Kontroversi” yakni Antara Citra dan Kerja dalam gambar judul tersebut hanya memperlihatkan sosok Jokowi, hal ini membuktikan bahwa koran Sindo hanya ingin menyorot sosok Jokowi saja.

Gambar 3.11



Sumber: (koran Sindo 2015)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan peran Presiden dalam memastikan pembangunan berjalan di segala bidang lebih penting dibandingkan wacana perombakan anggota kabinet.

"*Reshuffle* kabinet mungkin perlu, tetapi peran orang nomor satu, peranan Presiden, itu yang paling penting," kata Hary Tanoesoedibjo dalam dialog kebangsaan di Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut Hary, berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dipersalahkan belakangan memang tidak lepas dari kerja para menteri pembantu presiden.

Meskipun demikian dia menilai Presiden juga berperan memberikan arahan bagi para menterinya. "*Reshuffle* perlu jika menteri tidak bisa bekerja sama dengan baik. Tapi peran pimpinan sangat penting untuk memberikan arahan, evaluasi, kerja tim yang solid," jelasnya.

Hary mencontohkan, seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan yang memiliki ratusan manajer harus mampu memastikan manajernya bekerja dengan baik sesuai visi dan misi perusahaan.

Hal serupa menurut dia, berlaku juga dalam level kabinet pemerintahan. Sebelumnya wacana perombakan anggota Kabinet Kerja mencuat ditengah perlambatan perekonomian nasional belakangan ini. Menteri yang cukup mendapat sorotan untuk dirombak adalah bidang ekonomi (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/16/nrjgut-hary-tanoesoedibjo-lebih-penting-peran-presiden-ketimbang-reshuffle> diakses pada Selasa 20 Oktober 2015 pukul 20.10)

Pemilihan berita ini tidak lepas dari kepemilikan Hari Tanoesoedibjo sebagai pemilik koran tersebut, yang mana juga memiliki media MNC Group dan juga seorang politisi pendiri Perindo yang mana masuk dalam koalisi Merah Putih yang merupakan oposisi dari pemerintah Jokowi-JK. Politisasi berita yang dilakukan koran Sindo terhadap berita seratus hari pemerintahan Jokowi menyangkut mengenai faktor kepentingan koran Sindo dalam mewacanakan berita seratus hari pemerintahan Jokowi-JK. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa alasan koran Sindo memilih berita-berita tersebut karena ingin memberi kesan bahwa pemerintahan Jokowi-JK buruk dengan banyaknya kontroversi dan hal lainnya yang telah diberitakan oleh koran Sindo.

Van Dijk mengungkapkan bahwa ada dua poin yang penting dalam analisis kognisi sosial yakni kekuasaan (*power*) dan akses (*access*) (Eriyanto, 2001:272). Dalam hal ini Hari Tanoesoedibjo memiliki ke dua poin tersebut. *Power* yang HT miliki karena keterlibatan dirinya ke dalam dunia politik, HT menjadi seorang politisi setelah bergabung dengan Nasdem yang awal mula dibentuk menjadi sebuah organisasi yang pada akhirnya berubah menjadi partai politik.

Keterlibatan HT menjadi politisi menjadikan HT memiliki *power* yang besar terhadap masyarakat. Sebelumnya HT dikenal sebagai pengusaha sukses yang berhasil merintis kerajaan media. Pamor HT semakin menanjak setelah keikutsertaannya ke dunia politik terlebih lagi ketika HT akhirnya keluar dari Nasdem dan merapat ke kubu Hanura dan mendaftar di bursa calon presiden bersama Wiranto di pemilu 2014 silam. Karena pencalonan tersebut HT kerap menghiiasi televisi, yang mana digunakan sebagai kampanye, tak hanya iklan HT dan Wiranto mempunyai program khusus yaitu "Mewujudkan Mimpi Indonesia" dan acara kuis "Win-HT" yang mana acara tersebut dibuat untuk mendongkrak popularitas. Sekarang HT merupakan ketua dari partai Perindo yang mana partai ini bergabung dalam KMP. Hal ini menjadikan HT lebih dikenal masyarakat dan mau tidak mau sosoknya menjadi akrab di mata publik.

Dilihat dari hal akses HT sangat mempunyai akses kedalam media, HT merupakan salah satu pengusaha pemilik media terbanyak. Terbukti dengan adanya MNC Group yang mana menguasai berbagai media mulai dari media

cetak, televisi dan juga online. Akses yang besar bukan hanya memberi kesempatan untuk mengontrol kesadaran khalayak lebih besar, tetapi juga menentukan topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebar dan didiskusikan kepada khalayak.

Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Partai Persatuan Indonesia (PPP), partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat, banyak diantaranya merupakan pemiliki media, seperti Golkar yang mana Abu Rizal Bakrie sebagai ketua partai memiliki media televisi Tv One dan viva News, HT memiliki RCTI, MNCTV, Global TV, radio Trijaya FM, media cetak Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust, dan tabloid remaja Genie dan masih banyak lagi. (<http://mnc.co.id/>).

Gambar 3.12

MNC Group



Sumber: <http://mnc.co.id/>

Pemusatan sumber daya yang dilakukan oleh konglomerat-konglomerat pers mengundang sejumlah kekhawatiran di kalangan publik. Masyarakat mencemaskan

munculnya oligopoli raksasa pers akan bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli terhadap aliran informasi atas nama kepemilikan (Hill, 2011:97).

Prinsip media pada dasarnya bersifat independent dan netral dalam menyampaikan sebuah berita tetapi karena adanya wacana politik dan bias dalam media hal ini sulit dibuktikan. Sebagai kelompok dominan dalam media Sindo, HT memiliki banyak kepentingan dalam mengontrol medianya. Kepemilikan dan akses yang dimiliki HT menjadikan media sebagai senjata utama untuk mengembangkan ideologi dan memarjinalkan pihak lain yakni lawan politiknya.

Dengan mudahnya akses yang dimiliki KMP, jelas bahwa KMP mampu menjadi kelompok dominan dalam menguasai wacana publik. Hal ini mempermudah KMP dalam menyebarkan ide atau gagasannya mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. *Power* dan akses yang dimiliki HT merupakan suatu kelebihan HT dibandingkan dengan Jokowi. Di sini media difungsikan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan wacana yang negatif mengenai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.

Ada beberapa alasan mengapa koran Sindo mewacanakan berita negatif mengenai Pemerintahan Jokowi-JK salah satunya adalah adanya wacana Pilpres 2019 yang diketahui bahwa HT menjadi ketua dari Partai Perindo yang pasti akan mendaftar dalam bursa calon presiden tahun 2019 mendatang. Wacana-wacana yang dicanangkan koran Sindo terhadap Kinerja Kabinet dan Citra mengenai

Jokowi bisa saja merupakan sebagai upaya dalam rangka menjatuhkan pamor agar di pilihan Presiden mendatang HT bersama partainya mendapat suara yang banyak.

Perindo Siap Hadapi Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo melakukan kunjungan ke Kantor Harian Umum Republika. Tujuan dari kunjungan itu adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Republika sekaligus menyampaikan visi misi serta persepektif dari Perindo.

Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, partai yang didirikannya pada Oktober tahun lalu kini tengah terus mempersiapkan untuk menghadapi pilpres 2019.

"Saat ini, kami fokus untuk memperkokoh partai," ucapnya dalam kunjungannya ke Kantor Harian Umum Republika, Jakarta Selatan pada Jumat (9/10).

Ia juga mengatakan, pada prinsipnya, Perindo melakukan persiapan pilpres secara mengalir saja. Akan seperti apa nantinya, lanjut dia, yang terpenting adalah Perindo dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia.

"Sambil menuju Pilpres, kami bekerja keras untuk memperkuat jaringan partai," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini jaringan Perindo telah mencapai tingkat kecamatan. Targetnya, lanjut Hary, tahun depan sudah dapat memperluas jaringan hingga ke seluruh kelurahan di Indonesia.

Dengan begitu, ia berharap Perindo dapat segera mengakar di masyarakat. Baginya, mengakar itu mutlak diperlukan oleh sebuah partai agar dapat lebih memasyarakat(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/10/09/nvyk20354-perindo-siap-hadapi-pilpres-2019> diakses pada Selasa 20 Oktober 2015 pukul 20.00).

Wacana yang dilakukan koran Sindo dalam memberitakan Pemerintahan Jokowi-JK juga bisa disebabkan karena adanya politik balas dendam terhadap kroni-kroni KIH yang mana dua partai yang bergabung dalam KIH merupakan bekas partai dahulu HT menjabat.

Dalam hal ini KMP merupakan kelompok dominan yang mana memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Kepemilikan akses terhadap media menunjukkan penguasaan akses, sebagai kelompok dominan untuk memarjinalkan kelompok lain. HT dan KMP sering kali menggunakan media untuk melegitimasi dan mempropagandakan berbagai kepentingan. Media dianggap dapat membantu dan mempermudah pencapaian terhadap kepentingan-kepentingannya. Bayangkan saja berapa banyak media yang dimiliki oleh Koalisi Merah Putih tersebut, jika berbagai media itu melancarkan wacana yang sama maka bukan tidak mungkin masyarakat akan terhegemoni terhadap citra yang disampaikan oleh media yang berada dalam koalisi tersebut dan memberikan pengaruh kepada masyarakat sesuai dengan ideologi yang dianut oleh media tersebut.

5. Akses Penyebaran Ideologi

Van Dijk memandang bahwa ideologi merupakan sistem sosial yang digunakan bersama dalam kelompok, dan menjadi representasi mental kelompok tersebut. Ideologi tampak lebih fundamental ketimbang ilmu pengetahuan. Ideologi melambangkan prinsip-prinsip yang mendasari kognisi sosial yang karenanya membentuk dasar-dasar pengetahuan, sikap dan lebih spesifik lagi kepercayaan-kepercayaan yang dibentuk bersama suatu kelompok (Van Dijk, 2003:1). Ideologi merupakan konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis, karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tersebut. Van Dijk mengungkapkan politik kewacanaan yakni:

"Political discourse may express group ideologies and other beliefs, especially in collective forms of text and talk such party program. But many forms of political discourse by individual speakers, and the ways they 'personalize' the group beliefs underly the more particular properties of political discourse. That is, between social beliefs and discourse we need a cognitive interface that represents personal beliefs, opinions or experiences" (Van Dijk, 2004:3)

Agar sebuah ideologi dapat menyebar diperlukan saluran dan media komunikasi. Dalam hal ini media massa menjadi alat untuk menyebar ideologi. Media massa dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang mana dalam informasi tersebut dapat mengandung ideologi tertentu terutama dalam informasi politik.

Informasi politik memang selalu menarik perhatian, tumbuhnya saluran-saluran politik tentunya bagus untuk kelangsungan demokrasi tetapi tidak bila saluran politik telah dimonopoli oleh seorang atau beberapa politisi yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang sangat besar (Soyomukti, 2013:82)

Media yang selama ini menjadi salah satu penyalur ideologi sudah banyak dikuasai oleh para politisi sehingga media bukan lagi berbasis untuk komunikasi rakyat, tetapi akibat didominasi oleh kepentingan kaum konglomerat media menjadi sarat dengan adanya ideologi tertentu yang mana untuk kepentingan-kepentingan pemilik media. Akibatnya masyarakat menjadi wadah untuk menerima ideologi pemilik media. Sekarang masyarakat harus lebih pandai dalam mengkritisi berita dimedia.

C. Catatan Penutup

Pemberitaan mengenai seratus hari pemerintahan Jokowi-JK di koran Sindo dibahas menggunakan analisis wacana model Van Dijk yang memiliki tiga aspek, aspek pertama merupakan analisis teks yang mana dalam pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dari naskah koran Sindo ditemukan struktur wacana seperti makro, mikro dan superstruktur, yang terbagi dalam elemen-elemen yang telah dikemukakan oleh Van Dijk, hal ini menunjukkan bahwa dalam naskah berita koran Sindo memiliki maksud untuk mewacanakan berita menurut kepentingan medianya. Aspek kedua merupakan kognisi Sosial yang merupakan aspek dari wartawan, dalam wawancara yang dilakukan dengan Ainun Najib selaku wartawan, redaktur nasional dan kepala biro Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa walaupun pengambilan keputusan berada dalam sebuah tim kerja, tetapi tim tersebut merupakan bagian dari sebuah media yang sama yang mana memungkinkan memiliki ideologi yang sama. Aspek ketiga merupakan konteks sosial, bagaimana wacana berkembang dalam masyarakat. Kita mengetahui bahwasanya ada dua aspek terpenting dalam kognisi sosial yakni *power* dan akses yang mana HT selaku pemimpin koran Sindo memiliki kedua *power* tersebut. Hal ini menjadikan HT menjadi leluasa untuk menentukan wacana apa yang hendak diberitakan.

Hal ini tentunya karena relasi kuasa dalam media, banyak terjadi konglomerasi media di Indonesia yang mana kepemilikan media bukan oleh seorang pebisnis

belaka tetapi oleh para politisi yang tentunya memiliki kepentingan masing-masing dalam medianya. Kepentingan dalam penelitian ini merupakan kepentingan untuk mengkontruksikan berita mengenai pihak oposisi terhadap pihak koalisi yang mana jika masyarakat terhegemoni akan menguntungkan para pemilik kepentingan. Sebagai contoh mengenai pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri, dalam hal ini koran Sindo memberitakan bahwa Presiden dan partai pendukungnya yang menyebabkan kisruh antara KPK dan Polri akibat pengangkatan Budi Gunawan. Padahal di sini perlu dilihat lagi bahwa Peran DPR sangat besar dalam mengesahkan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jika DPR tidak menyetujui maka Budi Gunawan tidak akan menjadi Kapolri, Hal ini mungkin bisa dilihat karena adanya kartelisasi politik yang ada di DPR yang mana sebagian besar dikuasai oleh partai oposisi, yang mungkin sengaja ingin menurunkan kredibilitas Koalisi Indonesia Hebat terutama kubu Jokowi di depan masyarakat.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa koran Sindo melakukan wacana negatif mengenai Jokowi-JK, adanya politik balas dendam yang dilakukan HT karena dua dari partai sebelumnya merupakan partai dalam KIH, kemudian wacana mengenai pilihan Presiden 2019 yang bisa diketahui bahwa HT selaku pemilik Sindo dan pimpinan partai ingin mengambil keuntungan dari wacana negatif ini agar nantinya HT dapat mengambil keuntungan dari wacana tersebut, yakni dengan memperoleh suara rakyat.